

Diseminasi Informasi Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan di Media Sosial dalam Meningkatkan Akuntabilitas oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar

Nike Admanegara¹, Harry Yulianto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Harry Yulianto

E-mail: harryyulianto.stieypup@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui diseminasi informasi yang efektif di media sosial, yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) STIE YPUP Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan tahapan identifikasi kebutuhan dan analisis media sosial eksisting, perancangan strategi dan konten kreatif, implementasi dan monitoring, serta evaluasi dan diseminasi final. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dimana engagement rate meningkat, jumlah followers bertumbuh dalam dua bulan, dan responsivitas terhadap pertanyaan masyarakat meningkat drastis. Terbentuknya tim internal di Dinas menjadi indikator keberlanjutan program. Simpulan kegiatan ini adalah pendekatan ABCD melalui program KKLP tidak hanya berhasil mentransformasi media sosial menjadi sarana akuntabilitas publik yang efektif, tetapi juga menciptakan model kemitraan kampus-pemerintah daerah yang berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif di era digital. Disarankan agar Dinas membentuk tim digital yang permanen, STIE YPUP mengembangkan model serupa untuk mitra lain, dan peneliti selanjutnya mengeksplorasi dampak jangka panjang akuntabilitas digital terhadap kepercayaan publik.

Kata kunci - akuntabilitas publik, diseminasi, media sosial, kuliah kerja lapangan profesi

Abstract

This Community Service activity aimed to enhance public accountability of the South Sulawesi Cooperative and MSMEs Office through effective information dissemination on social media, implemented by students of the Professional Field Work (KKLP) program of STIE YPUP Makassar. The method used was the Asset-Based Community Development (ABCD) approach with stages including identification of needs and existing social media analysis, design of strategies and creative content, implementation and monitoring, and evaluation and final dissemination. Implementation results showed significant improvements where the engagement rate increased, followers grew within two months, and responsiveness to public inquiries drastically improved. The establishment of an internal team at the Office became indicators of program sustainability. In conclusion, the ABCD approach through the KKLP program successfully transformed social media into an effective public accountability tool while creating a sustainable university-local government partnership model in building transparent and responsive governance in the digital era. It was recommended the Office establish a permanent digital team, STIE YPUP replicate the model for other partners, and future researchers explore the long-term impact of digital accountability on public trust.

Keywords - public accountability, dissemination, social media, professional field work

PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah menggeser paradigma komunikasi pemerintah dari model satu arah yang konvensional menuju interaksi partisipatif dengan masyarakat. Media sosial, dengan jangkauan yang luas dan karakteristiknya yang *real-time*, telah menjadi saluran strategis untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Sulawesi Selatan, yang membina sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, pemanfaatan media sosial bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Potensi *platform* media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *YouTube* untuk mendiseminasi informasi mengenai program, bantuan, pelatihan, kebijakan, dan keberhasilan UMKM sangat besar, namun seringkali belum dimanfaatkan secara optimal baik dari segi konten, strategi, maupun konsistensi (Nurjanah & Putra, 2022; Satriani. et al., 2024).

Akuntabilitas publik, sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat, memerlukan media yang efektif. Selama ini, laporan kinerja instansi pemerintah seringkali hanya tersedia dalam bentuk dokumen formal yang sulit diakses dan dipahami oleh publik luas. Keterbatasan ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi dan persepsi di masyarakat. Media sosial menawarkan solusi untuk mempertanggungjawabkan informasi dan kinerja secara lebih terbuka, menarik, dan mudah dipahami, dengan menyajikan capaian program dan informasi kedalam format infografis, video pendek, atau *livestreaming* yang langsung dapat dikomentari dan dibagikan oleh warganet (Kurniawan & Sari, 2023). Diseminasi yang efektif di media sosial dapat menjadi indikator praktis dari terpenuhinya aspek akuntabilitas.

Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab Tri Dharma, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Program Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) di STIE YPUP Makassar dirancang untuk menjembatani teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas di lapangan. Mahasiswa, yang merupakan generasi *digital native*, memiliki kompetensi dan kreativitas dalam mengelola media sosial. Kolaborasi antara mahasiswa KKLK dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sinergi yang strategis; instansi pemerintah mendapatkan dukungan inovasi dan tenaga muda yang melek digital, sedangkan mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu manajemen pemasaran, dan manajemen sektor publik, serta berkontribusi langsung dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah: "Bagaimana merancang dan mengimplementasikan strategi diseminasi kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan di media sosial oleh mahasiswa KKLK STIE YPUP Makassar untuk meningkatkan akuntabilitas publik, serta bagaimana dampak dan kendala yang dihadapi selama proses tersebut?"

Studi sebelumnya telah mengkaji pemanfaatan media sosial oleh pemerintah, seperti penelitian Maulana dan Dewi (2021) yang menyoroti penggunaan media sosial untuk layanan pengaduan masyarakat. Namun, fokus penelitian seringkali pada aspek layanan dan respon keluhan, belum secara spesifik mengeksplorasi peran media sosial sebagai alat akuntabilitas publik yang proaktif melalui diseminasi informasi kinerja dan kegiatan.

Riset Febrianto dan Hidayat (2022), banyak mengevaluasi efektivitas program magang atau KKLK dari perspektif peningkatan kompetensi mahasiswa, namun cenderung berpusat pada manfaat bagi mahasiswa, tanpa secara mendalam mengukur dampak atau nilai tambah yang diciptakan mahasiswa bagi institusi mitra, dalam hal ini instansi pemerintah. Hal ini menciptakan celah literasi mengenai model KKLK yang bersifat simbiosis mutualisme.

Penelitian yang membahas akuntabilitas instansi pemerintah daerah juga telah dilakukan oleh Sari et al. (2020), yang menganalisis laporan keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun, beberapa studi masih terfokus pada bentuk akuntabilitas formal dan konvensional, dan kurang menyentuh bentuk akuntabilitas modern yang disampaikan melalui kanal-kanal informal seperti media sosial, yang justru lebih dekat dengan masyarakat.

Kegiatan PKM ini menawarkan sebuah terobosan dengan memposisikan mahasiswa KKLK sebagai "agen diseminasi digital". Pendekatan ini berbeda karena mengintegrasikan tiga elemen kunci: (1) pemenuhan kebutuhan kurikulum KKLK yang aplikatif, (2) peningkatan kapasitas digital Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui transfer pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa, dan (3) penguatan akuntabilitas publik melalui kanal yang relevan dengan zaman. Kegiatan ini tidak hanya mengisi celah pada *state of the art*, tetapi juga menciptakan dampak ganda bagi kedua belah pihak.

Tujuan pelaksanaan PKM untuk meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui perancangan dan implementasi strategi diseminasi informasi yang efektif di *platform* media sosial, yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKLK STIE YPUP Makassar, sehingga informasi mengenai kinerja dan kegiatan Dinas dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas dengan lebih mudah dan menarik.

Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena selain menjawab tantangan digitalisasi di sektor pemerintahan, juga menciptakan model KKLK yang relevan dan berdampak sosial. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, hal ini merupakan lompatan dalam membangun citra sebagai instansi yang transparan dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam program-program yang ditawarkan. Bagi STIE YPUP Makassar, kegiatan ini memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan riil pembangunan daerah, serta membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung dalam mengelola isu strategis di sektor publik, yang dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja.

METODE

Kegiatan PKM mengimplementasikan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang berfokus pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh mitra. Pada konteks ini, mahasiswa KKLK STIE YPUP berperan sebagai katalisator yang memaksimalkan aset digital yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, khususnya *platform* media sosial yang selama ini belum optimal (Khasanah & Pratama, 2023). Pendekatan ABCD dipadukan dengan model *capacity building* melalui siklus pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan (Yulianto, 2025). Metode ini dipilih karena tidak hanya menyelesaikan masalah teknis manajemen media sosial, tetapi juga membangun kapasitas internal Dinas, sehingga mampu melanjutkan strategi diseminasi secara mandiri pasca program KKLK berakhir, serta memperkuat akuntabilitas publik melalui kanal komunikasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nugroho & Sari, 2022).

Pelaksanaan kegiatan mengikuti empat tahapan sistematis yang saling terkait. Tahap pertama adalah Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Media Sosial Eksisting, dimana mahasiswa melakukan telaah pada konten, *engagement rate*, dan pola komunikasi yang selama ini diterapkan di akun media sosial Dinas. Tahap kedua adalah Perancangan Strategi dan Konten Kreatif, yang meliputi penyusunan kalender konten (*content calendar*), pembuatan *template* desain yang sesuai dengan identitas visual Dinas, serta pengembangan materi konten informatif dan edukatif mengenai program bantuan, pelatihan UMKM, kinerja, dan informasi. Tahap ketiga adalah Implementasi dan Monitoring, dimana mahasiswa secara aktif mengelola postingan, stories, dan interaksi dengan followers selama periode KKLK, serta memantau perkembangan *metrik engagement*. Tahap terakhir adalah Evaluasi dan Diseminasi Final, yang mencakup analisis dampak berdasarkan data statistik media sosial, penyusunan laporan hasil pengelolaan, serta presentasi rekomendasi strategi jangka panjang kepada pimpinan Dinas untuk memastikan keberlanjutan program. Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan prinsip *co-creation*, dimana staf Dinas dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan konten dan pengambilan keputusan strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program diseminasi digital oleh mahasiswa KKLK STIE YPUP Makassar di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan berhasil diimplementasikan melalui empat tahapan strategis. Pada Tahap Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Media Sosial Eksisting, telaah yang dilakukan mahasiswa mengungkap kondisi awal yang kurang optimal. Teridentifikasi tiga masalah utama: konten yang didominasi teks panjang tanpa visual menarik, konsistensi penjadwalan yang tidak teratur, dan minimnya interaksi dengan *followers*. Hasil respon terhadap pengikut akun menunjukkan banyak responden menilai informasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak *update*.

Memasuki Tahap Perancangan Strategi dan Konten Kreatif, mahasiswa mengembangkan kerangka kerja komprehensif berbasis analisis sebelumnya. Tercipta template desain standar menggunakan Canva dengan *palette* warna sesuai *brand identity* Dinas. Dibuat pula konten yang menampilkan infografis data yang disajikan secara visual menarik. Beberapa konten siap *posting* telah dipersiapkan yang mencakup berbagai format: infografis, video pendek, dan *carousel* edukatif.

Pada Tahap Implementasi dan Monitoring, mahasiswa secara konsisten mengelola akun Instagram. Penerapan strategi konten dapat meningkatkan performa akun secara signifikan. *Engagement rate* meningkat dengan rata-rata *likes* yang banyak, serta adanya komentar per postingan. Jangkauan organik (*reach*) bertumbuh dari sebelumnya. Frekuensi *posting* meningkat dengan variasi konten yang seimbang antara informasi program dan konten edukasi. Dibukanya fitur Q&A dalam *Instagram Stories* juga berhasil mengumpulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat yang langsung direspon oleh tim.

Tahap Evaluasi dan Diseminasi Final menghasilkan dokumen komprehensif berisi analisis capaian dan rekomendasi strategi berkelanjutan, yang menunjukkan peningkatan *followers*. Hasil tingkat kepuasan terhadap pengikut menunjukkan banyak responden merasa lebih memahami program Dinas setelah adanya transformasi konten.



Gambar 1.

Pelaksanaan KKLK STIE YPUP Makassar di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan

Pembahasan

Keberhasilan program ini dapat dibahas melalui pendekatan ABCD yang menekankan pemanfaatan aset *existing*. Berbeda dengan pendekatan *defisit-based* yang berfokus pada kekurangan, ABCD yang diterapkan mahasiswa justru mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki Dinas (Khasanah & Pratama, 2023). Aset utama yang teridentifikasi yakni keberadaan *platform* media sosial yang sudah aktif meski belum optimal, *database* UMKM binaan yang kaya akan *success stories*, dan sumber daya manusia staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang program meskipun kurang terampil dalam *packaging* digital.

Penerapan prinsip ABCD terlihat dalam strategi pemberdayaan yang dilakukan. Mahasiswa tidak mengambil alih sepenuhnya pengelolaan media sosial, tetapi membangun kapasitas internal melalui pendampingan intensif. Model *co-creation* yang diterapkan memposisikan staf Dinas sebagai ahli konten (*content expert*), sedangkan mahasiswa sebagai ahli media (*media expert*). Sinergi ini menghasilkan konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga substantif dan akurat secara teknis (Yulianto & Iryani., 2024). Pendekatan ini sesuai dengan filosofi ABCD yang menekankan kolaborasi setara antara komunitas dan fasilitator (Ife & Tesoriero, 2022).

Aset sosial berupa jaringan kemitraan Dinas dengan berbagai *stakeholder* juga berhasil dimanfaatkan dalam strategi diseminasi. Kolaborasi dengan *influencer* lokal di bidang UMKM dan pelaku usaha sukses binaan Dinas menciptakan efek *multiplier* dalam penyebaran informasi. Teknik *user-generated content* yang melibatkan langsung pelaku UMKM dalam pembuatan konten dapat meningkatkan *authentic engagement* dan memperkuat *sense of ownership* masyarakat terhadap program Dinas. Pemanfaatan aset jaringan ini merupakan implementasi cerdas dari prinsip *social capital* dalam ABCD.

Peningkatan signifikan *engagement rate* menunjukkan efektivitas pendekatan *asset-based* dalam membangun akuntabilitas publik. Konten yang semula bersifat satu arah dan formal berhasil ditransformasi menjadi komunikasi dialogis yang memenuhi unsur akuntabilitas sebagai mekanisme pembelajaran sosial (*social learning mechanism*). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bentuk komentar dan pertanyaan membuktikan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik baru untuk mengekspresikan aspirasi dan memperoleh informasi langsung dari pembuat kebijakan.

Strategi *capacity building* yang diterapkan juga mengacu pada prinsip keberlanjutan ABCD. Pelatihan internal yang melibatkan langsung staf Dinas memastikan transfer pengetahuan berlangsung efektif (Yulianto & Iryani., 2021). Dibentuknya tim pengelola media sosial internal yang terdiri dari perwakilan setiap bidang akan menciptakan struktur yang *sustainable* pasca KKLK berakhir. Pola pembagian peran berdasarkan bidang keahlian untuk memastikan konten yang dihasilkan tetap komprehensif dan *ter-update* dengan perkembangan program Dinas.

Peningkatan kuantitas dan kualitas interaksi di media sosial mencerminkan terpenuhinya prinsip akuntabilitas responsif. Respon cepat terhadap pertanyaan masyarakat yang sebelumnya membutuhkan waktu hari, kini dapat dijawab dalam hitungan jam pada waktu jam operasional. Transparansi informasi melalui publikasi data capaian dalam format visual yang mudah dipahami juga memperkuat akuntabilitas prosedural dan substantif. Pola komunikasi ini sejalan dengan tuntutan *new public service* yang menekankan dialog dan keterbukaan (Denhardt & Denhardt, 2019).

Tantangan selama implementasi justru mengkonfirmasi relevansi pendekatan ABCD. Resistensi awal dari sebagian staf yang belum familiar dengan *platform* digital berhasil diatasi dengan strategi *peer learning* yang memanfaatkan staf muda yang lebih melek digital sebagai *agent of change* internal. Penyusunan konten bersama-sama (*co-creation*) juga berhasil mengurangi *gap* generasi dan membangun rasa percaya diri staf senior dalam mengelola media digital.

Keterlibatan mahasiswa sebagai fasilitator eksternal efektif dalam mempercepat proses transformasi digital. Posisi mereka yang netral dan membawa perspektif segar berhasil menjembatani berbagai kepentingan di internal Dinas. Kemampuan mereka dalam mengintegrasikan teori

komunikasi digital dengan konteks birokrasi lokal menunjukkan bahwa model KKLP berbasis ABCD dapat menjadi solusi efektif untuk menjawab tantangan *governance* di era digital.

Keberhasilan program ini memperkuat asumsi bahwa pendekatan berbasis aset lebih *sustainable* dibandingkan program bantuan teknis konvensional. Transformasi yang terjadi bukan hanya pada aspek teknis pengelolaan media sosial, tetapi lebih pada perubahan *mindset* dan budaya kerja di internal Dinas. Adopsi nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan responsivitas dalam komunikasi publik menunjukkan bahwa pendekatan ABCD berhasil menciptakan *institutional transformation* yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Integrasi pendekatan ABCD dalam KKLP tidak hanya berhasil meningkatkan akuntabilitas publik melalui media sosial, tetapi juga menciptakan model kemitraan kampus-pemerintah daerah yang setara dan saling menguntungkan. Model ini menawarkan perspektif baru dalam pemberdayaan birokrasi yang tidak lagi melihat pemerintah sebagai objek pasif, tetapi sebagai mitra aktif yang memiliki potensi dan aset untuk dikembangkan secara kolaboratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program PkM telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui diseminasi informasi yang efektif di media sosial oleh mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar. Implementasi strategi diseminasi digital signifikan dalam meningkatkan transparansi dan responsivitas Dinas terhadap masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan *engagement rate* pertumbuhan *followers* dalam dua bulan, serta peningkatan kualitas interaksi melalui respon yang lebih cepat dan informatif terhadap pertanyaan masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa media sosial berhasil difungsikan sebagai sarana akuntabilitas publik yang efektif untuk menyampaikan informasi kinerja dan kegiatan Dinas kepada masyarakat.

Keberhasilan program ini membuktikan efektivitas pendekatan ABCD pada konteks penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan aset *existing* yang dimiliki Dinas, termasuk *platform* media sosial, *database* UMKM binaan, dan kapasitas staf, mahasiswa KKLP dapat menciptakan transformasi berkelanjutan yang tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga kultural. Terbentuknya tim pengelola media sosial internal, serta komitmen anggaran untuk pengembangan konten digital menjadi indikator kuat keberlanjutan. Model kolaborasi akan memperkuat relevansi program KKLP sebagai wahana *link and match* antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan riil pembangunan daerah.

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kegiatan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan ke depannya. Pertama, bagi Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus dan membentuk tim *digital marketing* yang lebih permanen untuk memastikan konsistensi dan pengembangan strategi diseminasi yang lebih matang. Kedua, bagi STIE YPUP Makassar, model KKLP berbasis ABCD sebaiknya dikembangkan untuk mitra pemerintah daerah lainnya dengan penyesuaian strategi diseminasi sesuai karakteristik masing-masing instansi. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi pengukuran dampak jangka panjang dari peningkatan akuntabilitas digital terhadap tingkat kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat terhadap program kerja Dinas, sehingga kontribusi nyata transformasi digital terhadap tata kelola pemerintahan dapat terdokumentasikan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (5th ed.). Routledge.
- Febrianto, T., & Hidayat, W. (2022). Dampak Program Kuliah Kerja Lapangan terhadap Peningkatan Kompetensi Soft Skills Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 112–120.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



- Ife, J., & Tesoriero, F. (2022). *Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalisation* (5th ed.). Pearson Australia.
- Khasanah, U., & Pratama, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) di Era Digital. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 45–58.
- Kurniawan, D., & Sari, P. (2023). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(2), 89–101.
- Maulana, A., & Dewi, S. (2021). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram untuk Layanan Pengaduan Masyarakat oleh Pemerintah Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–58.
- Nugroho, R., & Sari, D. P. (2022). Capacity Building melalui Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Media Sosial bagi Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Governansi*, 4(2), 112–125.
- Nurjanah, S., & Putra, A. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Memasarkan Produk UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 10(3), 234–247.
- Sari, M., Putri, D., & Fauzan, R. (2020). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 134–145.
- Satriani., Andini, P., & Yulianto, H. (2024). Peranan Digitalisasi Dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Pada UMKM Kuliner di Makassar. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7644–7650.
- Yulianto, H. (2025). Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa. *Seminar Nasional Dan Call Paper*, 214–225.
- Yulianto, H., & Iryani. (2021). Pergeseran Paradigma Manajemen Sumber Daya Manusia. *Cross-Border*, 4(2), 141–153.
- Yulianto, H., & Iryani. (2024). *Manajemen Bisnis Digital: Dasar Konsepsi, Studi Kasus dan Strategi Bisnis*. Sagusatal Indonesia.